

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98)
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
7. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program serta kebijakan.
8. Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
9. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
10. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

11. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
12. Sumber data adalah sumber data primer maupun sekunder yang digunakan sebagai rujukan untuk memperoleh data capaian kinerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah :

- (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan

- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung.

BAB V

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Desember 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

I. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dihitung oleh BPS	DINDIKPORA
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, dihitung oleh BPS	
		Indek Pembangunan pemuda	Perhitungan dilakukan oleh pihak ke tiga/ independen	
2	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	Jumlah pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik SD dikali 100%	DINDIKPORA
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	Jumlah pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik SMP dikali 100%	
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	Jumlah pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik TK dikali 100%	

3	Meningkatnya akses pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APK SD sederajat	Jumlah siswa SD-sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%	DINDIKPORA
		Rasio APK Perempuan/ Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	APK Perempuan SD/SDLB/MI/ Paket A dibagi APK Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	
		Persentase APM SD sederajat	Jumlah siswa SD-sederajat usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%	
		Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	APM Perempuan SD/SDLB/MI/ Paket A dibagi APM Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas SD negeri dalam kondisi baik dibagi jumlah ruang kelas SD negeri dikali 100%	
4	Meningkatnya mutu pendidikan SD	Persentase SD terakreditasi minimal B	Jumlah SD terakreditasi A dan B dibagi jumlah SD dikali 100%	DINDIKPORA
		Angka kelulusan SD	Jumlah peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan SD dibagi jumlah peserta ujian SD dikali 100%	
		Angka putus sekolah SD sederajat	Jumlah siswa putus sekolah SD dan MI dibagi jumlah siswa SD dan MI dikali 100%	
5	Meningkatnya akses pendidikan SMP	Persentase APK SMP sederajat	Jumlah siswa SMP-sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%	DINDIKPORA
		Rasio APK Perempuan/ Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	APK Perempuan SMP/SMPLB/MTs/ Paket B dibagi APK Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	
		Persentase APM SMP sederajat	Jumlah siswa SMP-sederajat usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%	
		Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	APM Perempuan SMP/SMPLB/MTs/ Paket B dibagi APM Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	Jumlah siswa baru tingkat I SMP/MTs tahun T dibagi jumlah lulusan SD/MI tahun T-1	
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas SMP negeri dalam kondisi baik dibagi jumlah ruang kelas SMP negeri dikali 100%	

6	Meningkatnya mutu pendidikan SMP	Persentase SMP terakreditasi minimal B	Jumlah SMP terakreditasi A dan B dibagi jumlah SMP dikali 100%	DINDIKPORA
		Angka kelulusan SMP	Jumlah peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan SMP dibagi jumlah peserta ujian SMP dikali 100%	
		Angka putus sekolah SMP sederajat	Jumlah siswa SMP dan MTs yang putus sekolah dibagi jumlah siswa SMP dan MTs dikali 100%	
7	Meningkatnya akses pendidikan PAUD	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	Jumlah peserta didik PAUD/sederajat usia 4-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun dikali 100%	DINDIKPORA
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	Jumlah peserta didik PAUD/sederajat usia 0-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 0-6 tahun dikali 100%	
8	Meningkatnya mutu pendidikan PAUD	Persentase TK terakreditasi minimal B	Jumlah TK yang terakreditasi A dan terakreditasi B dibagi jumlah TK	DINDIKPORA
9	Meningkatnya mutu pendidikan nonformal	Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun	Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun dikali 100%	DINDIKPORA
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	Jumlah peserta ujian Paket A/B/C/Ula/Wustha/Ulya yang dinyatakan lulus dibagi jumlah peserta ujian Paket A/B/C/Ula/Wustha/ Ulya dikali 100%	
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	Jumlah penduduk usia sekolah dibagi jumlah guru keagamaan	
10	Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda dikali 100%	DINDIKPORA
11	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki sertifikat dibagi jumlah pelatih olahraga dikali 100%	DINDIKPORA
		Persentase prestasi olahraga	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi dibagi jumlah cabang olahraga dikali 100%	
		Persentase atlet berprestasi	Jumlah atlet yang berprestasi minimal juara 3 tingkat provinsi dibagi nomor per-tandingan yang diikuti dikali 100%	

II. DINAS KESEHATAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	dihitung dengan program MCPDA atau Mortpack	DINKES
		Angka Kematian Ibu (AKI)	jumlah ibu yang meninggal karena hamil bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 100.000 kelahiran hidup	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	jumlah bayi (berumur kurang dari 1 tahun) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 1.000 kelahiran hidup	
		Prevalensi balita gizi buruk	jumlah balita gizi buruk (0 sampai 60 bulan) yang ditemukan dibagi jumlah seluruh anak balita dikali 100%	
		Persentase rumah tangga yang memiliki jamban	Jumlah rumah tangga yang memiliki jamban dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%	
2	Meningkatnya pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi standar dibagi jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja kurun waktu satu tahun dikali 100%	DINKES
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	Jumlah obat yang tersedia sesuai kebutuhan dibagi jumlah kebutuhan obat yang ada di wilayah kerja dalam waktu satu tahun dikali 100%	
		Persentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	Jumlah gedung Puskesmas yang sesuai standar dibagi jumlah Puskesmas yang ada di wilayah kerja pada waktu satu tahun dikali 100%	

3	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Persentase balita umur 7-23 bulan mendapat ASI Eksklusif	Jumlah bayi umur < 6 bulan mendapat ASI eksklusif dibagi jumlah semua bayi lahir hidup umur < 6 bulan kali 100%	DINKES
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	Jumlah penderita stunting (baru dan lama) pada Anak Baduta (0-24 bulan) dibagi jumlah Anak Baduta (0-24 bulan) kali 100%	
		Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita	Jumlah penderita gizi kurang pada anak balita (0-60 bulan) dibagi jumlah semua balita kali 100%	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	Jumlah ibu hamil dengan anemia pada saat kunjungan pertama (K1) dibagi jumlah seluruh ibu hamil yang diperiksa disuatu wilayah pada periode tertentu kali 100%	
		Persentase PHBS RT dengan strata utama dan paripurna	Jumlah PHBS -RT strata utama dan paripurna dibagi jumlah rumah tangga yang dipantau pada wilayah kerja dalam waktu satu tahun dikali 100%	
		Persentase desa bebas rawan gizi	Jumlah desa bebas rawan gizi dibagi jumlah desa yang ada dikali 100%	
		Persentase rumah sehat	Jumlah rumah sehat dibagi jumlah seluruh rumah di wilayah kerja dalam waktu satu tahun dikali 100%	
4	Tercegahnya dan terkendalnya Penyakit	Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi campak	Jumlah anak umur 1 tahun mendapatkan imunisasi campak dibagi jumlah semua anak umur 1 tahun kali 100%	DINKES
		Angka penemuan kasus baru kusta	Jumlah penderita Kusta yang ditemukan dibagi Jumlah penduduk dikali 100.000 penduduk	
		Persentase orang dg TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dibagi jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	
		Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi Hiv yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	

		Angka penemuan penderita DBD per 100.000 penduduk	Jumlah penderita positif DBD dibagi jumlah penduduk di wilayah dan waktu yang sama dikali 100.000	
		Angka penemuan penderita Malaria per 1.000 penduduk	Jumlah penderita positif malaria di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah penduduk beresiko pada wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 1.000	
		Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerja berdasarkan prevalensi dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	
		Persentase penderita DM mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 th berdasarkan prevalensi dalam waktu satu tahun dikali 100%	
		Persentase UCI desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan UCI dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada di wilayah kerja dalam waktu satu tahun dikali 100%	
		Persentase ODGJ berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja dalam waktu satu tahun dikali 100%	
		Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam	Jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada di wilayah kerja dalam waktu satu tahun dikali 100%	
5	Meningkatnya pelayanan kesehatan	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian neonatal dibagi jumlah semua kelahiran hidup kali 1.000	DINKES
		Persentase neonatal dengan komplikasi ditangani	Jumlah neonatal dengan komplikasi yang ditangani dibagi jumlah semua neonatal dengan komplikasi kali 100%	

	Angka kematian balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian balita dibagi jumlah semua kelahiran hidup kali 1.000	
	Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yg memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah persalinan oleh bidan atau Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan dibagi jumlah semua ibu bersalin kali 100%	
	Persentase pertolongan persalinan di faskes	Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan dibagi jumlah semua ibu bersalin kali 100%	
	Persentase kunjungan baru di yankesdas (kunj RJ di puskesmas)	Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan di sarana kesehatan dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah penduduk di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 100%	
	Persentase FKTP milik Pemerintah terakreditasi utama	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah yang terakreditasi utama dibagi jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah yang sudah terakreditasi dikali 100%	
	Persentase kepuasan masy di FKTP min 90%	Jumlah fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah yang tingkat kepuasan masyarakatnya > 90% dibagi jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah dikali 100%	
	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dibagi jumlah sasaran bayi baru lahir di wil kerja dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	
	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah balita usia 12-59 bulan di wil kerja dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	
	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah semua anak usia pendidikan dasar di wil kerja dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	

		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan anenatal sesuai standar di wil kerja dibagi jumlah sasaran ibu hamil di wil kerja dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan wil kerja dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di wil kerja dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah orang usia 15-59 tahun di wil kerja dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	
		Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah semua warga negara usia 60 tahun keatas di wil kerja dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	

III. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Indeks kinerja RSUD	Total score aspek penilaian kinerja keuangan ditambah kinerja non keuangan (Kategori Sehat > 65)	RSUD
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	Prosentase Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di RSUD	Jumlah kunjungan pasien penduduk miskin yang dilayani JKT dibagi Jumlah penduduk miskin sakit yang tidak dijamin Jamkesmas dikali 100%	RSUD
3	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana yang ada dibagi Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dikali 100%	RSUD
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah bab yang mendapatkan nilai > 80 dibagi jumlah bab dikali 100%	RSUD

IV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase Peminjam di Perpustakaan	Jumlah peminjam buku dibagi jumlah pengunjung perpustakaan dikali 100%	DINARPUS
2	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Manajemen Kearsipan	Akumulasi dari hasil audit internal dan eksternal dibagi 2	DINARPUS
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan	persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	(jumlah pengunjung dikurangi jumlah pengunjung tahun sebelumnya) dibagi jumlah pengunjung tahun sebelumnya x 100%	DINARPUS
		Persentase perpustakaan yang aktif	jumlah perpustakaan aktif dibagi jumlah Perpustakaan x 100	
4	Meningkatnya pengelolaan dan Pelestarian arsip daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	jumlah perangkat daerah, unit kerja, kelurahan dan desa yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku dibagi perangkat daerah, unit kerja, kelurahan dan desa x 100	DINARPUS
		Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	jumlah arsip vital konvensional yang di alih mediakan dibagi jumlah arsip vital konvensional x 100	

V. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Persentase pelestarian cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya yang ada dikali 100%	DINBUDPAR
		Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	Jumlah kelompok seni budaya teregistrasi yang aktif dibagi jumlah keseluruhan kelompok seni budaya yang teregistrasi	
2	Meningkatnya pariwisata daerah	Pertumbuhan peningkatan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan tahun berjalan dikurangi jumlah wisatawan tahun sebelumnya dibagi jumlah wisatawan tahun sebelumnya dikali 100%	DINBUDPAR
		Lama tinggal wisatawan	Jumlah LOS Hotel di Temanggung dibagi jumlah hotel	
3	Meningkatnya pengelolaan kebudayaan	Persentase pelestarian cagar budaya dan sejarah	Jumlah CB dan Sejarah Lokal yang dilestarikan dibagi Jumlah CB dan Sejarah dikali 100%	DINBUDPAR
		Persentase kelompok pelestari dan pecinta bahasa/ sastra yang aktif	Jumlah Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra aktif dibagi Jumlah Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra dikali 100%	
4	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	jumlah obyek wisata yang berkembang dibagi jumlah potensi wisata dikali 100%	DINBUDPAR
		Persentase jumlah Desa wisata	jumlah desa wisata dibagi jumlah desa dikali 100%	

VI. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Toleransi	Diukur dengan 4 parameter yaitu inklusi terhadap minoritas, dukungan sosial kepada minoritas, penerimaan terhadap sosial budaya dan kesetaraan gender	KESBANGPOL
2	pendidikan politik masyarakat	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih yang terdaftar dikali 100%	KESBANGPOL
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	Jumlah perempuan yang mewaliki di lembaga dibagi jumlah perempuan dikali 100%	
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	Jumlah perempuan yang mewaliki di DPRD dibagi jumlah perempuan dikali 100%	
3	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	Jumlah konflik politik dan keamanan yang tertangani dibagi Jumlah konflik politik dan keamanan yang dilaporkan dikali 100%	KESBANGPOL
4	Ketahanan seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	Jumlah FKUB yang terbentuk dikecamatan dibagi Jumlah FKUB dikali 100%	KESBANGPOL
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	Jumlah konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi yang tertangani dibagi Jumlah konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi yang dilaporkan dikali 100%	
5	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	Jumlah sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan dibagi Jumlah sekolah yang ada dikali 100%	KESBANGPOL
		persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan dibagi Jumlah desa/kelurahan yang ada dikali 100%	

6	Pembinaan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada dikali 100%	KESBANGPOL
		Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibagi Jumlah sekolah yang ada dikali 100%	

VII. DINAS SOSIAL

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka Kemiskinan	Angka BPS	DINSOS
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dibagi jumlah rumah dikali 100%	
		Persentase rehabilitasi social dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan social diluar panti social	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial di luar panti sosial yang mendapat rehabilitasi social dasar dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar di luar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi social dikali 100%	
2	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial di bagi Jumlah korban bencana X 100%	DINSOS
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan social di bagiJumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial X 100 %	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial di bagi Jumlah lanjut usia terlantar non potensial X 100 %	
3	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga , Masyarakat dan Panti/Barehsos	jumlah anak dan lansia terlantar yang ditangani di bagi Jumlah anak dan lansia terlantar berdasarkan laporan kejadian yang di tangani X 100 %	DINSOS

		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di bagi Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial X 100 %	
		Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial di bagi Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial X100 %	
4	Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial di bagi Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial X 100 %	DINSOS
		Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial di bagi Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial x 100	
5	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	Jumlah KK Miskin yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif di bagi Jumlah KK miskin (data kemiskinan) X 100 %	DINSOS
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah DT PPFM skala kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100 %	
6	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP X 100 %	DINSOS

VIII. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Jumlah penduduk tahun tertentu di bagi jumlah penduduk tahun dasar di kalikan selisih jumlah penduduk tahun tertentu dengan tahun dasar di kalikan 100.	DPPKBPPPA
2	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3[(Xede(1) + Xede(2) + 1inc-dis)]$	DPPKBPPPA
		Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah Perempuan dan Anak Korban kekerasan yang melapor dan di tangani di bandingkan jumlah rumah tangga yang ada perempuan dan anak korban kekerasan kali 100.	
3	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang di adukan dibandingkan dengan kasus anak dan perempuan yang di tangani dikalikan 100.	DPPKBPPPA
		presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dibandingkan jumlah perempuan pada angkatan kerja kali 100.	
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah KDRT yang di laporkan dalam periode satu tahun per 1000 RT	
		Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	Jumlah Kecamatan layak anak di bandingkan dengan kecamatan yang ada kali 100.	
		Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	Jumlah Pemerintah Daerah yang menerapkan anggaran responsive gender (ARD) di bandingkan jumph Pemerintah Daerah yang ada kali 100.	

4	Meningkatnya pengendalian penduduk dan informasi keluarga	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	Jumlah KK yang ada di bagi dengan jumlah KK yang di sajikan kali 100.	DPPKBPPPA
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed	Jumlah PUS di kurangi jumlah peserta KB aktif di kurangi PUS hamil dan ingin anak segera (IAS) di bagi jumlah pasangan Usia Subur kali 100.	
		Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Jumlah PUS < 20 tahun di bagi jumlah PUS secara keseluruhan di kalikan 100 .	
		Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	Banyaknya kelahiran selama satu tahun pada kelompok umur WUS di bagi WUS 15 – 19 tahun kali 1000.	
5	Meningkatnya kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	Jumlah PUS yang memiliki pengetahuan tentang semua alat kontrasepsi dari proses pemasangan jangka waktu penggunaan, efektifitas penggunaan dan efek samping alat kontrasepsi tersebut di bandingkan jumlah seluruh PUS di kalikan 100 %.	DPPKBPPPA
		Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) suatu cara (all methods) pada perempuan usia 15-49	Anngka yang menunjukkan jumlah PUS usia 15 – 49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi KB di bandingkan jumlah PUS yang ada kali 100.	
		Persentase kepesertaan KB aktif	Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi (peserta KB aktif)/Jumlah Pasangan Usia Subur x 100	
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	Jumlah peserta KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dibagi jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi kali 100	
6	Meningkatnya kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga	Persentase keluarga sejahtera III	Jumlah keluarga sejahtera III dibagi jumlah seluruh keluarga kali 100	DPPKBPPPA
		Persentase keluarga sejahtera III plus	Jumlah keluarga sejahtera III plus dibagi jumlah seluruh keluarga kali 100	
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah presentase Kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah jumlah seluruh Kampung KB di bagi jumlah desa dengan kriteria IDM desa berkembang dan desa tertinggal di kalikan 100.	

Misi 2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

I. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks yang diterima petani dibagi indeks yang dibayar petani dikali 100	DINTANPANGAN
2	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan harapan (SPPH)	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) dikali bobot masing-masing kelompok pangan	DINTANPANGAN
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	ketersediaan energi dibagi ketersediaan pangan dikali kandungan kalori kali Berat Dapat Dimakan (BDD) dibagi 100	DINTANPANGAN
		Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	Rumus perhitungan ketersediaan protein perkapita yaitu ketersediaan protein dibagi ketersediaan pangan dikali kandungan protein kali Berat Dapat Dimakan (BDD) dibagi 100	
4	Meningkatnya produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Tanaman Pangan	Produktivitas Padi	Total Produksi dibagi luas panen	DINTANPANGAN
		Produktivitas Jagung	Total Produksi dibagi luas panen	
		Produktivitas Ubi kayu	Total Produksi dibagi luas panen	
5	Meningkatnya produktivitas penerapan tehnologi dan agribisnis Hortikultura	Produktivitas bawang putih	Total Produksi dibagi luas panen	DINTANPANGAN
		Produktivitas bawang merah	Total Produksi dibagi luas panen	
		Produktivitas cabai rawit	Total Produksi dibagi luas panen	
		Produktivitas cabai besar	Total Produksi dibagi luas panen	
		Produktivitas kentang	Total Produksi dibagi luas panen	
		Produktivitas durian	Total Produksi dibagi luas panen	
Produktivitas jambu biji	Total Produksi dibagi luas panen			

6	pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Desa (Posluhdes)	jumlah kelembagaan yang naik kapasitasnya dibagi jumlah total posluhdes dikali 100%	DINTANPANGAN
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	jumlah kelompok tani yang naik kelas dibagi jumlah total kelompok tani dikali 100%	
		Persentase perkembangan Lembaga ekonomi petani	jumlah kelompok tani yang tergabung di KEP dibagi jumlah total kelompok tani dikali 100%.	
7	Meningkatnya produktivitas penerapan teknologi dan agribisnis Perkebunan	Produktivitas tembakau	Total Produksi dibagi luas panen	DINTANPANGAN
		Produktivitas kopi robusta	Total Produksi dibagi luas panen	
		Produktivitas kopi Arabika	Total Produksi dibagi luas panen	
		Produktifitas Cengkeh	Total Produksi dibagi luas panen	
		Produktifitas Vanili	Total Produksi dibagi luas panen	

II. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kedaulatan pangan	Tingkat Konsumsi Ikan	Jumlah Konsumsi Ikan per orang dalam satu tahun	DISNAKAN
2	Meningkatnya pengembangan perikanan	Produktivitas Ikan Nila	Jumlah produksi ikan nila (kg) per luas kolam (m2)	DISNAKAN
		Produktivitas Ikan Lele	Jumlah produksi ikan lele (kg) per luas kolam (m2)	
		Produktivitas Ikan Mas	Jumlah produksi ikan mas (kg) per luas kolam (m2)	
3	pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	Prevalensi penyakit Sapi	Jumlah kejadian penyakit sapi pada tahun (n) dibagi jumlah populasi sapi pada tahun (n) dikali 100%	DISNAKAN
		Prevalensi penyakit Domba	Jumlah kejadian penyakit domba pada tahun (n) dibagi jumlah populasi domba pada tahun (n) dikali 100%	
		Prevalensi penyakit Kambing	Jumlah kejadian penyakit kambing pada tahun (n) dibagi jumlah populasi kambing pada tahun (n) dikali 100%	
		Prevalensi penyakit Unggas	Jumlah kejadian penyakit unggas pada tahun (n) dibagi jumlah populasi unggas pada tahun (n) dikali 100%	
4	Meningkatnya pemenuhan pangan asal hewan	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	jumlah usaha produk hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat dibagi jumlah usaha produk hewan dan produk asal hewan yang dipantau dikalikan 100%	DISNAKAN
5	Meningkatnya produktivitas ternak dan hasil ternak	Produktivitas ternak sapi	Produktifitas sapi per ekor	DISNAKAN
		Produktivitas ternak domba	Produktifitas domba per ekor	
		Produktivitas ternak kambing	Produktifitas kambing per ekor	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Produktifitas ayam pedaging per ekor	
		Produktivitas ternak ayam ras petelur	Produktifitas ayam petelur per ekor	
		Produktivitas ternak ayam buras	Produktifitas ayam buras per ekor	

III. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi Sektor Perindustrian	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	DINPERINDAGKOP DAN UKM
		Kontribusi Sektor Perdagangan	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB	
		Persentase Koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi dikali 100%	
		Persentase UKM Aktif	Jumlah UKM aktif dibagi Jumlah seluruh UKM dikali 100%	
2	Meningkatnya pengembangan koperasi dan UKM	Persentase koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi dikali 100	DINPERINDAGKOP DAN UKM
		Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	Nilai aset dan omset koperasi tahun N dikurangi nilai aset dan omset tahun sebelumnya dibagi nilai aset dan omset koperasi tahun sebelumnya dikali 100	
		Persentase usaha mikro yang berkembang	Usaha mikro yang berkembang dibagi usaha mikro yang ada dikali 100	
3	Meningkatnya pengembangan perdagangan	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	Jumlah hari kerja yang tersedia informasi tentang harga bapok dan bahan lainnya penyebab inflasi dibagi jumlah hari dalam satu tahun dikali 100	DINPERINDAGKOP DAN UKM
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan dibagi jumlah PKL keseluruhan kali 100	
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	Jumlah UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun n	
		Nilai Ekspor Non Migas	Jumlah komulatif laporan ekspor tahun n	

4	Meningkatnya pengelolaan pasar	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	Jumlah nilai pasar dibagi jumlah pasar daerah dikali 100	DINPERINDAGKOP DAN UKM
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	Jumlah pedagang yang sudah sesuai dengan zonasi dibagi jumlah pedagang keseluruhan	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	Realisasi pendapatan pasar dibagi target pendapatan pasar dikali 100	
5	Meningkatnya Pengembangan Industri	Persentase IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	Jumlah IKM Industri berbasis komoditas unggulan daerah dibagi jumlah keseluruhan ikm industri dikali 100	DINPERINDAGKOP DAN UKM

IV. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Pertumbuhan Investasi Daerah	Nilai investasi tahun berjalan dikurangi nilai investasi tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya dikali 100%	DPMPTSP
2	Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji dibagi (:) Jumlah seluruh Potensi Investasi' dikali (x) 100 %	DPMPTSP
		Persentase ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dibagi (:) Jumlah SDM dikali (x) 100 %	
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	Jumlah informasi yang akan disediakan dibagi(:) jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan kali (x) 100%	
3	Peningkatan Iklim Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Nilai investasi pada tahun berjalan	DPMPTSP
4	Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	Jumlah permohonan yang masuk melalui online dibagi dengan semua permohonan izin yang masuk kali (x) 100 %	DPMPTSP
		Persentase perijinan yang bebas calo	Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo dibagi permohonan perizinan kali 100	
		Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan izin kali 100	
5	Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan dibagi dengan jumlah izin yang diterbitkan kali 100 %	DPMPTSP
		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Jumlah Pengaduan masyarakat dibagi dengan terselesaikannya jumlah aduan kali 100%	
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan dibagi dengan jumlah gugatan hukum kali 100%	

V. DINAS TENAGA KERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah penduduk Angkatan Kerja dibagi Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) dikali 100%	DISNAKER
2	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	Jumlah lulusan pelatihan yang telah bekerja atau membuka usaha sendiri dibagi dengan jumlah peserta pelatihan dikali 100 %	DISNAKER
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%	
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi	jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100%.	
		Tingkat Setengah Pengangguran	jumlah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%	
		Presentase tenaga kerja formal	jumlah tenaga kerja formal dibagi jumlah seluruh tenaga kerja dikali 100%	
3	perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	jumlah tenaga kerja peserta BPJS dibagi jumlah tenaga kerja total.	DISNAKER
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	jumlah perusahaan yang membayar upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan dikali 100%	
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	jumlah perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial dibagi jumlah perusahaan dikali 100%	

		Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian jumlah perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dibagi jumlah perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dikali 100% bersama	jumlah perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dibagi jumlah perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dikali 100%	
4	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang dibagi jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dikali 100%	DISNAKER
5	Meningkatnya pemberdayaan transmigran	Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan	jumlah calon transmigran yang mendapatkan pembekalan dibagi jumlah calon transmigran dikali 100%	DISNAKER

VI. DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas Infrastruktur wilayah	Presentase Infrastruktur Kondisi baik	Rata-rata dari variabel-variabel persentase infrastruktur kondisi baik	DPUPKP
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	Luasan yang sesuai peruntukannya dibagi luas kabupaten temanggung dikali 100%	
		Presentase Kawasan Kumuh Perkotaan	Luasan kumuh perkotaan di bagi luasan permukiman perkotaan dikali 100%	
2	penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan memenuhi standart rambu lalu lintas /panjang jalan kabupaten dikalikan 100%.	DPUPKP
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung	jumlah Panjang jalan Kabuaten yang menghubungkan pusat kegiatan yang terhubung dibagi total panjang jalan kabupaten dikalikan 100%.	
3	penyelenggaraan jembatan	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	jumlah jembatan kabupaten kondisi baik / jumlah jembatan kabupaten yang ada dikalikan 100%.	DPUPKP
4	pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	jumlah DI jaringan irigasi yang kondisi baik / jumlah keseluruhan DI jaringan irigasi dikalikan 100%.	DPUPKP
5	pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Data Panjang Jaringan drainase pada skala kawasan/kota yang ada dibagi data panjang jalan kabupaten skala kawasan/kota dikalikan 100%.	DPUPKP
6	pembinaan jasa kontruksi	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	jumlah informasi minimal yang terupdate dalam aplikasi Sipjaki dibagi jenis layanan minimal dikalikan 100%.	DPUPKP

7	penyelenggaraan tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	Jumlah luasan ruang yang sesuai perencanaan / jumlah luasan wilayah kab Temanggung dikali 100%	DPUPKP
8	Pengembangan Kawasan Strategis	Prosentase kawasan strategis yang dikembangkan	jumlah kawasan strategis yang dikembangkan / jumlah total kawasan strategis yang dikembangkan dikalikan 100%	DPUPKP
9	pengembangan perumahan dan permukiman	Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak / jumlah rumah tangga yang ada dikalikan 100%	DPUPKP
		Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni tahun n/Jumlah rumah tinggal tahun n dikalikan 100%	
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	Luas Kawasan Kumuh dibagi Luasan Perukiman Perkotaan dikalikan 100%	
10	pengembangan dan penataan kota	Cakupan RTH publik	jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dibagi jumlah Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Temanggung dikali 100%	DPUPKP
		Persentase penerangan jalan umum di luar jalan kabupaten	membagi jumlah PJU dengan Jumlah Ruas Jalan Kabupaten dikalikan 100%	
11	Administrasi Pertanahan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	jumlah kasus pertanahan yang diajukan dibagi jumlah kasus yang difasilitasi dibagi 100%	DPUPKP
		Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar parakan	Luas Tanah yang dibeli untuk membangun jalan lingkar dibagi Luas Tanah yang dibutuhkan untuk membangun jalan lingkar dikalikan 100%	

VII. DINAS PERHUBUNGAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas Infrastruktur wilayah	Presentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Angka kecelakaan lalu lintas tahun n dikurangi angka kecelakaan lalu lintas tahun (n-1) dibagi angka kecelakaan tahun (n-1) dikali 100%	DISHUB
2	Meningkatnya pengelolaan Lalu Lintas dan Perparkiran	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	Jumlah ruas jalan kabupaten yang didukung perlengkapan jalan yang memadai dibagi Jumlah Ruas Jalan di Kabupaten Temanggung dikali 100%	DISHUB
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	Jumlah titik parkir tertangani dibagi jumlah titik parkir dikali 100%	
3	Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Presentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Jumlah kendaraan bermotor laik jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji dikali 100%	DISHUB
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 1 dikali 100%	
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 2 dikali 100%	
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 3 dikali 100%	
4	Meningkatnya pelayanan angkutan	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	Jumlah jaringan trayek yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah jaringan trayek kabupaten dikali 100%	DISHUB
		Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	Jumlah terminal tipe C aktif dibagi jumlah terminal tipe C dikali 100%	
		Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	Jumlah Terminal tipe C dalam kondisi baik dibagi jumlah terminal tipe C	

VIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)	$(30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$	DLH
2	Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$	DLH
		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi Kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung X 100 %	
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan Temanggung	Luas Lahan Kritis Tertangani dibagi Total Luas Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung kali 100%	
3	Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	$(\text{Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti} : \text{Jumlah pengaduan yang masuk}) \times 100$	DLH
		Indeks Kualitas Air	Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung	
		Indeks Kualitas Udara	Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung	
4	Meningkatnya kapasitas lingkungan hidup	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung	DLH
5	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Temanggung	DLH
		Cakupan pelayanan persampahan	Jumlah desa yang mendapat pelayanan persampahan dibagi jumlah Desa di Kabupaten Temanggung	

Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

I. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	Jumlah program dalam RKPD dibagi Jumlah Program dalam RPJMD dikali 100	BAPPEDA
2	Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu di bagi jumlah semua dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun di kalikan seratus persen	BAPPEDA
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	jumlah Laporan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu di bagi jumlah semua laporan evaluasi pembangunan daerah di kalikan seratus persen	
3	perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi di bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi di kalikan seratus persen	BAPPEDA
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang sumber daya alam	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber daya Alam di bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber daya Alam di kalikan seratus persen	
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur di bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur di kalikan seratus persen	

4	perencanaan dan evaluasi bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat di bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat di kalikan seratus persen	BAPPEDA
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber daya Manusia di bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia di kalikan seratus persen	
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan di bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan di kalikan seratus persen	
5	Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah penelitian dan pengkajian yang di tindaklanjuti dalam kebijakan daerah di bagi jumlah penelitian dan pengkajian secara keseluruhan di kalikan seratus persen	BAPPEDA
		Persentase hasil kreasi dan inovasi yang di kembangkan	Jumlah hasil kreasi dan inovasi yang di kembangkan dan di terapkan di bagi jumlah hasil kreasi dan inovasi secara keseluruhan di kalikan seratus persen	

II. BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyajian sesuai SAP kepatuhan peraturan perundangan Tingkat materialitas temuan Sistem pengendalian internal	BPPKAD
2	Meningkatnya pendataan dan pelayanan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	Rumus pertumbuhan objek pajak adalah $n-1$ dibagi n dikali 100%.	BPPKAD
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi Jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen.	
3	pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	jumlah SPPT yang dilakukan dimutakhirkan datanya dengan jumlah OP PBB secara keseluruhan dikalikan 100%.	BPPKAD
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	jumlah permohonan/pengajuan SKPD dibagi dengan jumlah SKPD yang diterbitkan dikalikan 100%.	
4	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%.	BPPKAD
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%	
5	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Realisasi belanja terhadap APBD	Jumlah Belanja dibagi Anggaran di APBD dikali 100%	BPPKAD
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	jumlah nama kegiatan yang ada dalam penganggaran yang sama dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan di bagi dengan total jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan	

		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang direncanakan dikali 100%	
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	jumlah total SP2D yang dicairkan tepat dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100%	
6	Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100%	BPPKAD
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.	
7	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel di bagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100%	BPPKAD
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dikali 100%	

III. SEKRETARIAT DAERAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indek capaian kinerja	ASISTEN PEMERINTAHAN
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah kegiatan yang dilaksanakan dikali 100%	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai komulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	ASISTEN ADMINISTRASI
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	Jumlah Pilar yang terinventarisir dan telah dilakukan pengecekan langsung di lokasi dibagi jumlah pilar batas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dikali 100%	BAGIAN PEMERINTAHAN
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu dibagi Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM dikali 100%	
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	jumlah Kecamatan yang mengirimkan Laporan Bulanan Camat tepat waktu dan lengkap dibagi jumlah Kecamatan di Kabupaten Temanggung dikali 100%	

3	Penyusunan dan penataan Produk Hukum	Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati yang menindaklanjuti Peraturan Daerah dibagi jumlah total Peraturan Bupati dikali 100%	BAGIAN HUKUM
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH dibagi jumlah total Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dikali 100%	
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara nonlitigasi	Jumlah permasalahan yang ditangani secara litigasi dibagi jumlah total permasalahan dikali 100%	
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	Jumlah permasalahan yang ditangani secara nonlitigasi dibagi jumlah total permasalahan dikali 100%	
4	pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	Jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan dikali 100%	BAGIAN KESRA
5	pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	Jumlah Realisasi Barang Subsidi yang Beredar dibagi Target Barang Subsidi yang Beredar dikali 100%	BAGIAN PEREKONOMIAN
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	Jumlah Laporan Permasalahan Barang Subsidi yang Terselesaikan dibagi Target Laporan Permasalahan Barang Subsidi yang Terselesaikan dikali 100%	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Jumlah BUMD dengan Opini WTP dibagi Jumlah BUMD yang ada dikali 100%	
6	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu	jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan dibagi total kegiatan oleh penyedia dikali 100%	BAGIAN PEMBANGUNAN
7	Meningkatnya layanan Pengadaan	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	jml paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan dibagi Jumlah keseluruhan paket pekerjaan yang ada di SIRUP melalui tender dikali 100%	BAGIAN PBJ
		Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	Jumlah unit kerja yang menyampaikan DRUP tepat waktu dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100%	
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Jumlah pengadaan barang jasa yang masuk sistem SPSE dibagi keseluruhan PBJ dikali 100%	

8	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	Jumlah kebutuhan kedinasan kepala daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan kepala daerah dikali 100%	BAGIAN UMUM
9	Penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP	jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat B dibagi jumlah seluruh Perangkat daerah dikali 100	BAGIAN ORTALA
		Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi WBK/WBBM dibagi jumlah perangkat Daerah dikali 100	
10	Meningkatnya penyelenggaraan kehumasan	Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti dibagi jumlah target pengaduan masyarakat melalui media resmi pemkab yang ditindaklanjuti dikalikan 100	BAGIAN HUMAS
		Persentase peningkatan pengunjung website	jumlah pengunjung website tahun 2019 dibagi Jumlah Pengunjung Tahun 2018 kali seratus	
		Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi	Jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi dibagi target jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi di kalikan 100	

IV. INSPEKTORAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penilaian maturitas SPIP atas unsur unsur SPIP yang didukung oleh semua PD di Kabupaten Temanggung	INSPEKTORAT
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Nilai IPAK diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB	
2	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I	penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I dibagi jumlah temuan pada penugasan IRBAN I x 100%	INSPEKTORAT
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I	jumlah PD yang direview SAKIP nya pada IRBAN I dibagi jumlah PD yang direview SAKIPnya pada penugasan IRBAN I x 100 %	
		Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN II	penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN II dibagi jumlah temuan pada penugasan IRBAN II x 100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN II	jumlah PD yang direview SAKIP nya pada IRBAN II dibagi jumlah PD yang direview SAKIPnya pada penugasan IRBAN II x 100 %	
		Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III	penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III dibagi jumlah temuan pada penugasan IRBAN III x 100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN III	jumlah PD yang direview SAKIP nya pada IRBAN III dibagi jumlah PD yang direview SAKIPnya pada penugasan IRBAN III x 100 %	
		Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV	penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV dibagi jumlah temuan pada penugasan IRBAN IV x 100%	
Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN IV	jumlah PD yang direview SAKIP nya pada IRBAN IV dibagi jumlah PD yang direview SAKIPnya pada penugasan IRBAN IV x 100 %			

3	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	Jumlah sertifikasi profesi yang dimiliki pemeriksa dibagi jumlah pemeriksa x 100%	INSPEKTORAT
---	---	---	---	-------------

V. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Profesionalisme ASN	Indikator penilaian Indeks Profesionalisme ASN, dihitung dari angka kumulatif dimensi : kualifikasi pendidikan (bobot 25%), dimensi kompetensi (bobot 40%), dimensi kinerja (bobot 30%), dan dimensi disiplin (5%).	BKPSDM
2	Terkelolanya administrasi kepegawaian	Persentase Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Formasi dan terverifikasi dibagi Jumlah Perangkat Daerah di kali 100%	BKPSDM
		Persentase penyelesaian usulan pensiun tepat waktu	Jumlah SK Pensiun yang terbit sebelum TMT Pensiun dibagi Jumlah Usulan Pensiun yang memenuhi syarat dikalikan 100 %.	
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	Jumlah SK Kenaikan pangkat yang terbit sebelum TMT dibagi Jumlah Usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat dikalikan 100 %.	
3	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi Diklat Kepemimpinan	jumlah pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang telah lulus mengikuti diklat kepemimpinan dibagi jumlah pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang ada dikali 100%	BKPSDM
		Persentase ASN dengan kompetensi teknis dan fungsional sesuai jabatannya	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional dibagi jumlah PNS di kali 100%	
		Persentase keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan administrator, jabatan pengawas	Jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang terisi dibagi Jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas di kali 100%	

		Persentase perempuan pada jabatan eselon I, II, III, dan IV	Jumlah perempuan pada jabatan eselon I, II, III dan IV dibagi Jumlah pejabat eselon I, II, III, dan IV yang terisi	
4	Meningkatnya kualitas pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dibagi jumlah ASN di kali 100%	BKPSDM
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	Jumlah SK Hukuman Disiplin ASN dibagi Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN yang masuk di kali 100%	
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	Jumlah perubahan data PNS terverifikasi Jumlah Usulan Pengajuan Perubahan data PNS di kali 100%	

VI. SEKRETARIAT DPRD

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Jumlah raperda yang diajukan dibagi jumlah perda yang ditetapkan dikali 100%	SET DPRD
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	jumlah Peraturan Daerah Inisiatif dibagi jumlah raperda di kali 100%	SET DPRD
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan dikali 100%.	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100%.	

VII. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Bobot Nilai dari 3 Domain Tingkat Kematangan : Domain Kebijakan Internal, Domain Tata Kelola, Domain Layanan.	DINKOMINFO
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Bobot Nilai dari 4 Indikator : mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan informasi publik dan pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik	DINKOMINFO
2	Meningkatnya pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase ketersediaan akses internet publik	Jumlah ketersediaan akses internet di area publik dibagi jumlah area publik dikali 100%	DINKOMINFO
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	Jumlah OPD yang menggunakan jaringan intranet dibagi jumlah OPD dikali 100%	
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	Jumlah sistem informasi yang sudah terintegritas dibagi jumlah sistem informasi yang ada dikali 100%	
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi jumlah sistem informasi yang ada dikali 100%	
3	Berkembangnya Data Statistik	Cakupan ketersediaan data makro daerah	Jumlah data makro daerah yang tersedia dibagi 5 dikali 100%	DINKOMINFO
4	Meningkatnya penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	Prosentase sistem elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan risikonya sesuai prosedur dan standar dibagi jumlah sistem elektronik yang ada di OPD	DINKOMINFO

VIII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Tingkat Kepatuhan penyelenggaraan Layanan Publik	Bobot dari 10 komponen indikator :standar pelayanan, maklumat layanan, SIPP, sarpras fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan moto layanan, atribut, pelayanan terpadu	DINDUKCAPIL
2	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	jumlah kepemilikan kartu keluarga dibagi jumlah kepala keluarga dikalikan 100 persen	DINDUKCAPIL
		Persentase Kepemilikan KTP el	Jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP di bagi Jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah di kalikan 100 persen.	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	jumlah anak yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah wajib KIA (anak usia <17 tahun di kalikan 100 persen	
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	jumlah surat pindah datang yang diterbitkan tepat waktu pada tahun N dibagi jumlah pemohon surat pindah datang pada tahun N di kalikan 100 %	
3	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah total penduduk di kalikan 100 persen	DINDUKCAPIL
		Persentase penerbitan akte kematian	jumlah penerbitan akta kematian dibagi jumlah pemohon akta kematian di kalikan 100 persen	
		Cakupan pelayanan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu	jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian yang telah diterbitkan dibagi dengan jumlah permohonan pencatatan perkawinan dan perceraian non muslim dikali 100%.	

4	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik	jumlah sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana Adminduk yang tersedia di kalikan 100 persen	DINDUKCAPIL
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data dibagi jumlah perangkat daerah pengguna data kependudukan di Kabupaten Temanggung di kalikan 100 persen	
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	jumlah inovasi layanan dibagi jenis layanan di Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil di kalikan 100 persen	

IX. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Indek Gotong Royong	Indeks gotong royong terdiri dari 4 parameter yaitu kerjasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif dan kepercayaan sosial	DINPERMADES
		Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa	
		Persentase desa yang ber predikat mandiri	Jumlah desa yang berpredikat mandiri dibagi jumlah desa dikali 100%	
2	Meningkatnya kelembagaan masyarakat dan desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	jumlah desa/kelurahan swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan se Kabupaten Temanggung dikali 100%	DINPERMADES
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	jumlah Desa dan kelurahan yang berstatus Cepat Berkembang dibagi Jumlah desa dan kelurahan se Kabupaten Temanggung dikali 100%	
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%	
3	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.	DINPERMADES
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%	
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	

4	Meningkatnya lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	Jumlah BUMDesa yang aktif dibagi jumlah BUMDesa di seluruh kabupaten Temanggung dikali 100%	DINPERMADES
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang ada dikali 100%	
		Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	jumlah kawasan yang dikembangkan dibagi jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan perbup dikali 100%	
5	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa	Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.	DINPERMADES
		Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%.	
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali 100%.	

X. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Rasa Aman	Diukur dengan 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab	SATPOL PP DAN DAMKAR
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	jumlah pelanggaran perda dan pebup yang ditangani di tahun bersangkutan di bagi jumlah pelanggaran perda dan perbup yang dilaporkan dan atau dipantau di tahun	SATPOL PP DAN DAMKAR
		Rasio Petugas Satpol PP	Jumlah anggota satpol pp yang ada dibagi jumlah penduduk dikali 100%	
3	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per RT	Jumlah Anggota linmas yang ada dibagi jumlah rukun tetangga (RT)	SATPOL PP DAN DAMKAR
4	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	Jangkauan luas WMK/Luas wilayah kabupaten x 100%	SATPOL PP DAN DAMKAR
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang terangani dalam waktu tingkat tanggap / Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK x 100%	
		Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi/ jumlah aparatur pemadam kebakaran x 100	
5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dibagi jumlah kejadiankali 100 %	SATPOL PP DAN DAMKAR

6	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah dibagi Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X kali 100%	SATPOL PP DAN DAMKAR
---	--	--	--	----------------------

XI. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Cakupan desa tangguh bencana	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan rawan bencana dikali 100%	BPBD
2	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada masa tanggap darurat bencana dikalikan 100%	BPBD
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana dikali 100%	
3	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Cakupan desa tangguh bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%	BPBD
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	jumlah desa/kelurahan mitigasi dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%	
4	Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada pasca bencana dikalikan 100%	BPBD
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah korban pada pasca bencana dikali 100%	

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ